

PENDIDIKAN INKLUSIF SALAH SATU STRATEGI PENINGKATAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN

Oleh,

Endang Rusyani

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam pembangunan bangsa. Sejarah menunjukkan bahwa kunci keberhasilan pembangunan Negara-negara maju adalah tersedianya penduduk yang terdidik dalam jumlah, jenis, dan tingkat yang memadai. Oleh karena itu, hampir semua bangsa menempatkan pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasionalnya. Sumber daya manusia yang bermutu, yang merupakan produk pendidikan, merupakan rahasia keberhasilan pembangunan suatu Negara.

Menyadari hal tersebut di atas, mulai tahun 1994 telah dimulai Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun yang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia. Program ini menargetkan semua warga Negara Indonesia memiliki pendidikan minimal setara Sekolah menengah Pertama dengan mutu yang baik. Dengan bekal itu, diharapkan seluruh warga Negara Indonesia dapat mengembangkan dirinya lebih lanjut yang akhirnya mampu memilih dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya, sekaligus berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajardikdas) 9 Tahun, diperuntukkan bagi semua anak, tidak terkecuali anak-anak yang berkebutuhan khusus. Salah satu bentuk perhatian terhadap pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus didasarkan atas

jaminan konstitusi UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga Negara memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara, memperoleh pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan. Di samping itu, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), diperjelas oleh konvensi Hak Anak (1989), deklarasi pendidikan untuk semua (1990), Peraturan Standar PBB tentang persamaan kesempatan bagi para penyandang cacat (1993), pernyataan Salamanca dan Kerangka aksi UNESCO (1994), Undang-undang penyandang Kecacatan (1997), kerangka Aksi Dakar (2000), Undang-undang RI NO. 23 (1989) dan deklarasi kongres anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat.

Saat ini diperkirakan di dunia lebih dari 100 juta anak-anak yang tidak bersekolah dan membutuhkan layanan pendidikan khusus. Kebutuhan akan pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang mampu mengakomodasi berbagai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh setiap individu (ketidakberfungsian secara mental dan fisik), kultur minoritas, dan kelompok social ekonomi yang dipinggirkan (miskin, dieksploitasi, terisolasi, dan sebagainya). Hal yang paling menonjol diantara semua itu adalah pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, baik yang memiliki kecacatan secara fisik maupun mental. Selama ini layanan pendidikan dilaksanakan di lembaga-lembaga pendidikan secara terpisah (segregasi) yang dinamakan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang memberikan layanan pendidikan secara khusus sesuai dengan tingkat dan jenis kelainannya.

Menurut sejarahnya, pada awalnya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus disatukan dengan anak-anak pada umumnya – “anak yang normal” yaitu dilayani secara Integratif, seperti halnya anak normal lainnya, mereka mendapatkan kurikulum, guru, media, dan sarana-prasarana serta perlakuan layanan pembelajaran yang sama (metode pengajaran). Hal tersebut terjadi

karena di sekolah aspek pendukung belum ada, seperti: tenaga ahli (ortopedagog, psikolog, psikiater, dokter) yang mampu memberikan pelakuan khusus kepada anak yang berkelainan. Hasil pendidikannya bisa dibayangkan entah berantahnya, bahkan mereka bukan menjadi optimal perkembangan malahan semakin terpuruk keadaannya, mereka menjadi bahan olok-olokkan teman-temannya, karena tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang diberikan oleh gurunya. Dalam kondisi demikian, pendidikan tidak membantu secara social dalam meningkatkan kesadaran akan kesamaan hak, perbedaan potensi secara individual diantara peserta didik.

Berdasarkan kondisi empirik yang terjadi pada periode pertama, pada periode kedua, adalah terjadi perubahan paradigma penyelenggara pendidikan, yaitu periode dimana pendidikan untuk anak berkelainan dilakukan secara tersendiri dengan harapan anak akan merasa bahagia karena belajar bersama-sama dengan teman-teman senasib dan dapat mengoptimalkan potensinya Model penyelenggaraan pendidikan ini sifatnya segregatif, artinya membedakan lembaga pendidikan untuk anak-anak pada umumnya "normal" dan anak-anak berkelainan. Sebagai perwujudan model pendidikan ini adalah berdirinya sekolah-sekolah luar biasa (SLB) dengan lima layanan, yaitu; SLB bagian A (Tuna Netra), SLB bagian B (Tuna Rungu), SLB bagian C (Tuna Grahita) SLB bagian D (Tuna Daksa), SLB bagian E (Tuna Daksa) dan SLB bagian D (kelainan ganda). Model pendidikan ini memisahkan anak berkelainan dari lingkungan anak-anak pada umumnya. Mereka secara akademik memang menunjukkan ada perkembangan yang mengembirakan, tetapi secara sosial menimbulkan permasalahan-permasalahan, yaitu mereka terpenjarakan sehingga tidak dapat bergaul dengan anak-anak pada umumnya, pada sisi lain, masyarakat tidak terbiasa untuk menerima kecacatan, sehingga

apabila ada anak yang berkelainan di lingkungannya mereka menjadi tontonan, cemoohan, atau dianggap aib.

Tumbuhnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat bahwa manusia terlahir dengan keragaman potensi dan kelainan bukan kehendak untuk menjadi berkelainan, serta tumbuhnya kesadaran masyarakat akan kesamaan hak, bergeserlah paradigma pendidikan kearah yang lebih manusiawi yaitu pendidikan yang menghargai adanya keragaman potensi, kesamaan hak hidup kesamaan mendapatkan pendidikan yang bermutu, pendidikan yang tidak diskriminatif, pendidikan yang saling memberikan keuntungan dan manfaat manfaat bagi kesejahteraan bersama, maka pada periode terakhir melahirkan pola pendidikan yang ketiga, yaitu pendidikan yang berupaya menyatukan kembali pendidikan untuk anak berkelainan dengan anak-anak pada umumnya. Penyatuan pada periode ini lebih mempertimbangkan barbagai aspek, termasuk didalamnya aspek ketenagaan, sarana-prasarana, kurikulum, pendekatan pembelajaran dan aspek lainnya. Model pendidikan yang sedang dan telah mulai dikembangkan dinamakan sebagai pendidikan inklusif (***inclusuve education***), walaupun di Negara kita baru pada tahapan menuju Pendidikan Inklusif.

B. PENDIDIKAN INKLUSIF (INCLUSIVE EDUCATION)

Pendidikan inklusif adalah adalah sebuah konsep atau pendekatan pendidikan yang berusaha menjangkau semua orang tanpa kecuali (Supriadi, 2003). Semua anak memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari pendidikan. Hak dan kesempatan tersebut tidak dibedakan oleh keragaman karakteristik individu secara fisik, mental, social, emosional dan bahkan status social ekonominya. Pendidikan ini sejalan dengan filosofi pendidikan nasional Indonesia yang tidak membatasi akses peserta didik ke pendidikan hanya perbedaan

kondisi awal dan latar belakangnya. Inklusipun tidak hanya bagi anak-anak berkebutuhan khusus, melainkan berlaku untuk semua anak.

Gagasan pendidikan inklusif sejalan dengan kecenderungan global sejak satu dasawarsa terakhir, dimana-mana orang berbicara tentang perlunya dikembangkan perspektif pendidikan yang lebih inklusif, pendidikan yang tidak diskriminatif, pendidikan yang ramah untuk semua anak. Ini sejalan dengan isu-isu hak asasi manusia (human right), hak-hak anak (childrent' right), gerakan pro-kemanusiaan. Pendidikan yang memihak semua anak tersebut dinyatakan oleh UNESCO dalam deklarasi tentang pendidikan untuk semua (education for all).

Penerapan konsep inklusi melalui pintu masuk pendidikan luar biasa, juga memiliki arti khusus, karena pada akhir-akhir ini telah terjadi perubahan pendidikan luar biasa dari pendekatan yang sifatnya segregatif menuju inklusif. Ini terepresentasikan pada terjadinya perubahan dari special education ke special needs education yang memiliki implikasi yang luas terhadap praktek pendidikan. Untuk itu, pendidikan inklusif merupakan strategi utama dalam menangani anak -anak secara integrasi, Sapon-Shevin (O'Neil, 1994/1995), mendefinisikan inclusion sebagai system layanan pendidikan luar biasa yang mempersyaratkan agar semua anak luar biasa bersama teman-teman seusianya. Untuk itu, Sapon Shevin menekankan adanya resrukturisasi di sekolah sehingga menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus setiap anak, artinya kaya dalam sumber dan dukungan dari semua guru dan murid.

Stainback dan Stainback (1990), "Sekolah yang inklusif adalah sekolah yang menampung semua anak di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap anak maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh

para guru agar anak berhasil. Lebih dari itu, sekolah yang inklusif juga merupakan tempat setiap anak diterima, menjadi bagian dari kelas tersebut, maupun anggota masyarakat lain agar kebutuhan individualnya terpenuhi". Hal ini sejalan dengan pendapat Powel & Caseau (2004) yang menyatakan bahwa hal terpenting dari pendidikan inklusif adalah menolong anak dalam hal-hal akademik dan social.

Prinsip dasar pendidikan inklusif adalah bahwa semua anak harus memperoleh kesempatan untuk bersama-sama belajar dalam satu komunitas. Hal ini berarti bahwa sekolah umum harus dilengkapi untuk melihat dan menanggapi kebutuhan-kebutuhan pelajar yang beraneka ragam, termasuk mereka yang secara tradisional telah tersingkirkan, baik dari akses sekolah maupun peran serta setara di sekolah.

Anak-anak berkelainan memiliki jumlah besar, bahkan jumlahnya diluar dugaan, walaupun demikian, secara mayoritas anak-anak berkelainan, memiliki kelainan yang tidak parah yang tidak terdiagnosa serta terlihat dengan mata. Anak-anak berkelainan termasuk mereka yang memiliki kesulitan dalam belajar, berbicara, dalam hal fisik, kognitif, pendengaran, penglihatan, dan emosional. Anak berkelainan memiliki kemungkinan lebih besar dibanding anak-anak lainnya untuk tidak sekolah, atau keluar dari sekolah, atau keluar masuk sekolah. Penyusunan Laporan PBB mengenai Hak Asasi Manusia dan kecacatan tahun 1991 (UN Rapporteur on Human Rights and Disabilities) mengemukakan bahwa paling sedikit satu dari sepuluh orang di mayoritas Negara memiliki kelainan fisik, mental, atau indera (tunarungu, tunanetra). Angka sepuluh persen tersebut berarti anak-anak sekolah dasar di negara berkembang berjumlah 50 - 55 juta orang dimana kurang dari 5 persen diperkirakan mencapai sasaran program PUS (Pendidikan Untuk Semua) yaitu masuk ke sekolah dasar. Ada kemungkinan bahwa jumlah ini terus bertambah

akibat kondisi global dengan meningkatnya kemiskinan, konflik bersenjata, praktek perburuan anak, kekerasan dan pelecehan, serta HIV/AIDS. Karena anak-anak tersebut merupakan sebagian dari sebuah unit keluarga, diperkirakan paling sedikit 25% dari populasi dunia secara langsung dipengaruhi oleh adanya kelainan.

Pendidikan inklusif dalam prakteknya memfokuskan pada aspek kelebihan yang dibawa anak ke sekolah dari pada aspek kekurangannya, mereka yang terlihat dan secara khusus melihat pada bidang mana anak-anak dapat mengambil bagian untuk berpartisipasi dalam kehidupan pada umumnya masyarakat atau sekolah, atau memperhatikan apakah mereka memiliki hambatan fisik dan sosial karena lingkungan. Seperti yang ditunjukkan oleh Judith Haumann, Penasihat Bank Dunia mengenai Kecacatan dan Pembangunan, *“Bila anda tidak mengakui bahwa sesungguhnya para penyandang cacat memiliki pula kesempatan belajar, maka kesempatan mereka bukan dibatasi oleh kelainan mereka, tetapi oleh kurangnya pendidikan.”*

Pendidikan inklusif berarti bahwa sekolah dan guru harus mengakomodasi perbedaan individual di tengah-tengah layanan klasikal. Untuk itu, inklusifitas ini menguntungkan bagi sekolah, guru-guru, dan seluruh peserta didik. Karena dalam hal yang demikian terjadi saling memberi keuntungan dan kekuatan-kekuatan dibalik kekurangan-kekurangannya. Prinsip ini mengakui bahwa sekolah adalah komunitas pembelajar, pendidikan sebagai tujuan seumur hidup, dan sasaran akhir tercapainya warga Negara yang sehat dan produktif yang secara penuh ikut memberikan sumbangan pada kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa, masyarakat, dan keluarga.

Pada decade-dekade lalu, banyak pemberi dana yang menghindar untuk memberikan dukungan bagi anak-anak berkelainan, karena percaya bahwa program-program tersebut sangat mahal dan hanya sedikit memberi keuntungan bagi

pendidikan. Menurut laporan OECD 1994, penempatan anak-anak dengan kebutuhan khusus di sekolah umum adalah sampai sembilan kali lipat lebih murah dibanding dengan penempatan anak-anak tersebut di sekolah khusus. Ketika pendidikan inklusif diterapkan, penelitian terkini menunjukkan adanya peningkatan prestasi dan kemajuan pada semua anak. Di banyak negara di dunia melaporkan bahwa diperoleh manfaat pribadi, sosial, dan ekonomi dengan mendidik anak-anak usia sekolah dasar yang memiliki kebutuhan khusus di sekolah umum; Kebanyakan siswa dengan kebutuhan khusus ini berhasil diakomodasi dengan lebih murah dengan cara ini. Namun demikian, ada juga pengecualian apabila mereka ditempatkan di sekolah-sekolah terpadu. Hampir seluruh anggota negara OECD masih memasukan para tunanetra dan tunarungu dalam jumlah besar di sekolah khusus. Bagi populasi tunarungu, citra positif bahwa anak-anak berkembang dalam lingkungan 'bahasa isyarat' bernilai lebih tinggi dari pada keuntungan yang diperoleh dengan menempatkan mereka pada sekolah umum. Kemungkinan bagi orangtua untuk memilih penempatan bagi sekolah terpadu atau segregasi adalah penting.

Ada beberapa cara khusus yang dapat menolong untuk mengintegrasikan dan memelihara anak-anak berkelainan (berkebutuhan khusus) di dalam sekolah umum. Hal ini termasuk pula 1) strategi pelatihan pra-layanan dan layanan di lapangan bagi para pendidik dan administrator; 2) pusat sumber daya tersentralisasi, kerjasama dan program penjangkauan; 3) memobilisasi dan melatih orang tua sebagai sumber daya; 4) kolaborasi multi-sektor dan meningkatkan kapasitas program rehabilitasi berbasis masyarakat.

Tindakan-tindakan tersebut di atas membutuhkan jaminan mutu tersentralisasi dan jaminan hak asasi manusia, dan pendanaan terdesentralisasi untuk mengadakan inisiatif dan praktek inovatif yang memenuhi kebutuhan spesifik pada tingkat

lokal. Folam berbasis sumber daya manusia harus dipakai untuk mengalokasikan dana pada tingkat lokal berdasarkan kebutuhan program dengan mengkhhususkan pada tingkat dukungan (seperti ukuran kelas, guru pendukung), dan parameter-parameter lainnya dikaitkan dengan parameter-parameter pendidikan bermutu. Alokasi yang mendorong sistem yang seragam dalam penyampaian layanan pendidikan, dan yang menentukan dengan standar-standar kinerja adalah terbukti paling efektif.

Persoalan lain yang banyak dipertanyakan terhadap pendidikan inklusif adalah mutu. Dalam kaitannya dengan strategi pengajaran dan pembelajaran, pendidikan inklusif di ruang kelas menekankan pengelompokan multi-kemampuan untuk pengajaran, dukungan teman belajar, pembelajaran kooperatif, penilaian dalam beberapa bentuk (misalnya, standar berdasar kurikulum), partisipasi aktif yang terpusat pada siswa dalam pembelajaran, pengakomodasian gaya pembelajaran yang beragam, dan pendekatan pemecahan masalah reflektif kritis terhadap kurikulum dalam pengajaran. Semua strategi ini merupakan praktek terbaik dalam pengajaran yang efektif bagi semua anak. Strategi-strategi ini tercermin dalam materi baru sumber pelatihan guru yang dibuat oleh UNESCO, dan digunakan secara luas dalam prgram-program pelatihan di berbagai negara.

Pada skala besar, UNESCO meluncurkan program sekolah Inklusif dan dukungan masyarakat melalui sebuah proyek Global untuk memaksimalkan sumber daya manusia dan material demi mendukung pendidikan inklusif. Sejauh ini, 30 negara yang tersebar di berbagai belahan dunia yang terlibat. Berdasarkan aplikasi yang dikirimkan dari negara-negara yang berkomitmen untuk mengembangkan proyek Pendidikan Inklusif yang berkelanjutan, UNESCO memilih empat negara untuk difokuskan lebih lanjut termasuk India yang telah memulai sebuah proyek percobaan di sekolah-sekolah dasar dan menengah di Mumbai dan Chennai.

Komisi ekonomi dan sosial Asia Pasifik atau ESCAP (Economic and Social Commission of Asia and the Pasific) telah mendukung pula beberapa proyek di India sebagai bagian dari program perdananya dalam bidang kecacatan. Pelatihan guru intensif terfokus pada strategi pengajaran dan pembelajaran yang terpusat pada anak, dan menggabungkan praktek langsung dan sesi pengumpulan umpan balik. Sebagai bagian dari pelayihan tersebut, setiap sekolah ikut berpartisipasi dalam penyusunan proposal riset dan evaluasi untuk diterapkan. Dampak positif dalam hal perubahan sikap guru dan murid terhadap pengajaran dan pembelajaran, dan dalam prestasi murid didokumentasikan. Keberhasilan India memberi pengajaran yang cukup berarti.

Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan walaupun sudah ada kemajuan menuju Pendidikan Inklusif dan Pendidikan bagi Semua. Perampasan hak-hak asasi manusia dan ketidak setaraan yang menyolok dalam pemberian kesempatan masih menimpa anak-anak berkebutuhan khusus. Pengalaman negara-negara lain memberikan bukti yang kuat bahwa Pendidikan Inklusif harus menjadi prinsip penuntun untuk mencapai sasaran pembangunan melalui pendidikan untuk semua (education for all)

Sesungguhnya Pendidikan Inklusif merupakan bagian dari peningkatan kualitas bangsa ke depan hari, dimana pendidikan yang dilakukan menghargai keberagaman potensi untuk saling memberikan keuntungan dalam optimalisasi setiap potensi, dan pada gilirannya kualitas bangsa akan meningkat

C. ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kebutuhan yang spesifik dalam mengembangkan potensinya, atau anak-anak karena sesuatu hal, misalnya memiliki gangguan dalam hal fisik, mental, sosial, emosi dan perilaku sehingga memiliki

kebutuhan-kebutuhan yang lebih spesifik dalam upaya mengembangkan potensinya

Gangguan yang dialami oleh anak-anak yang berkebutuhan khusus berbeda-beda jenis dan tingkatannya. Dilihat dari jenisnya ada anak yang memiliki gangguan fisik dan psikis. Anak-anak yang memiliki gangguan fisik terdiri dari anak-anak yang memiliki gangguan penglihatan, pendengaran serta gangguan fisik dan kesehatan, sedangkan anak-anak yang memiliki gangguan psikis terdiri dari anak-anak yang secara fisik tidak mengalami gangguan. Gangguan mereka pada aspek mental, emosi, sosial dan perilaku, termasuk didalamnya anak-anak autis.

Anak yang memiliki gangguan penglihatan adalah anak-anak yang ketajaman penglihatannya di atas 20/200 kaki, dan yang tidak memiliki ketajaman penglihatan sama sekali. Dengan demikian, anak-anak yang mengalami gangguan penglihatan gangguannya bersifat gradual dari yang ringan sampai yang berat, tetapi pada umumnya dikelompokkan kedalam dua kelompok yaitu anak-anak yang masih memiliki sisa penglihatan (low vision) dan yang sudah tidak memiliki sisa penglihatan sama sekali (blind)

Anak-anak yang memiliki gangguan pendengaran (hearing impairment) adalah "A generic term indicating a hearing disability which may range in severity from mild to profound: it includes the subset of deaf and hard-of-hearing.

Deaf person is one whose hearing disability precludes successful processing of linguistic information through audition, with or without a hearing aid; hard-of-hearing person is one who generally with the use of a hearing aid, has residual hearing sufficient to enable successful processing of linguistic information through audition" (Hallahan & Kauffman (1991: 266)

Anak gangguan kesehatan dan fisik (physical and health impairment) adalah anak-anak yang mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang memerlukan keterampilan fisik,

seperti: mengalami kesulitan memegang pensil untuk menulis, bermain, berolahraga, melakukan mobilitas dan lainnya.

Anak-anak yang mengalami gangguan psikis yaitu anak-anak yang secara fisik tampak normal, tetapi mereka memiliki gangguan dalam fungsi kecerdasan, perilaku, emosi dan social, misalnya: anak-anak retardasi mental, tunalaras, hiperaktif dan gangguan perhatian (ADHD), dan autisme. Kelompok ini pun tingkat gangguannya bervariasi, mulai dari yang ringan sampai yang sangat berat.

Anak retardasi mental adalah anak yang mengalami gangguan fungsi intelektual umum di bawah rata-rata (subaverage), yaitu IQ 84 ke bawah berdasarkan test kecerdasan individual, (2) muncul sebelum usia 16 tahun, dan (3) menunjukkan hambatan dalam perilaku adaptif (Abdurrachman & Sudjadi: 1994)

Anak tunalaras disebut juga anak dengan gangguan perilaku, ada juga yang menyebut *emotionally disturbed*, *socially maladjusted*, *psychologically disorder* atau *emotionally handicapped*. Anak-anak ini secara fisik tidak menunjukkan adanya kelainan, tetapi karena perilakunya yang berbahaya atau karena tidak mampu menyesuaikan dengan norma-norma yang tumbuh dan berkembang di lingkungannya sehingga menjadi terisolasi dapat menyebabkan hambatan-hambatan yang berat dalam proses perkembangannya atau dalam proses pendidikannya. Dengan demikian anak tunalaras ini dapat didefinisikan sebagai anak yang mempunyai masalah dalam hubungan sosial, interpersonal atau intrapersonal sehingga memerlukan kebutuhan-kebutuhan yang khusus dalam mengembangkan potensinya.

Menurut asosiasi psikiatri Amerika th 2000, ADHD adalah gangguan psikiatri dengan symptom yang terjadi sebelum usia tujuh tahun. Indikator-indikator untuk menunjukkan anak mengalami gangguan hiperaktif dan kekurangmampuan konsentrasi adalah sebagai berikut:

1. Anak mengalami kesulitan berkonsentrasi / atau memiliki konsentrasi dengan rentang waktu yang pendek
2. Anak sangat aktif dan selalu bergerak/ hiperaktif – tidak dapat diam
3. Anak sering menunjukkan perilaku impulsif
4. Anak memiliki kemampuan mengingat yang pendek
5. Anak memiliki masalah dalam tidur dan biasanya sulit makan

D. WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun merupakan salah satu strategi kunci dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia agar mampu bersaing dalam era keterbukaan.

Dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas, Pemerintah melalui Inpres No. 1 Tahun 1994 dan Inpres No. 5 Tahun 2006 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, mewajibkan semua warga negara usia pendidikan dasar (7 – 15 tahun) tanpa memandang status sosial, etnis, jenis kelamin, dan keberagaman lainnya untuk menempuh minimal pendidikan dasar 9 tahun.

Upaya penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun dimulai pada tahun 1994 dengan target tuntas pada tahun 2003/2004, tetapi karena terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997, program ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan akhirnya target tidak tercapai. Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun dijadwal ulang dan ditargetkan tuntas pada tahun 2008/2009 dengan mengimplementasikan berbagai alternatif program penuntasan yang efektif dan efisien.

Pada tahun 2006 Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama (yang telah dan sedang mengikuti pendidikan dasar 9 tahun) mencapai 88,68 %, bahkan di 118 kabupaten/kota masih di bawah 75 %, sedangkan target APK yang dijadikan indikator Wajar Dikdas 9 Tahun adalah 95 % pada tahun 2008/2009. ini berarti pemerintah bersama-sama masyarakat

melakukan berbagai upaya untuk menaikkan APK sekitar 6,32 % dalam kurun waktu 2007 – 2008, dengan menyediakan tambahan layanan pendidikan bagi sekitar 1,5 juta anak. Disamping itu, angka putus sekolah SLTP masih tinggi yaitu sebesar 2,74 % (272.000 anak) yang dimungkinkan disebabkan oleh faktor ekonomi, adanya kesenjangan budaya dan kesetaraan jender, sarana dan prasaran pendidikan masih kurang, dan adanya kekurangmampuan mengikuti pola pendidikan yang sementara berjalan karena faktor kebutuhan khusus anak yang tidak terakomodasi. Untuk itu, pemerintah memandang perlu untuk melakukan berbagai upaya untuk mewujudkannya. Upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan pemerintah antara lain:

1. Pemerataan dan perluasan akses, seperti: pembangunan sekolah baru, pembangunan ruang kelas baru, menyelenggarakan SMP terbuka, sosialisasi dan publikasi, pemberian penghargaan Wydiakrama
2. Peningkatan mutu, Relevansi dan Daya Saing, meliputi: pelatihan guru tentang Contextual Teaching and Learning (CTL), Pendidikan Kecakapan Hidup, Pembelajaran MIPA Bilingual, Bridging Course, Pembinaan Kesiswaan (lomba penelitian ilmiah remaja, OSN, porseni, lomba puisi dan sastra, lomba motivasi belajar mandiri (lomojari), pembinaan sekolah (Sekolah Standar Nasional, Sekolah Koalisi, dan Sekolah Bertarap Internasional), Pengembangan SMP Berbasis Masyarakat (SBM lanjutan Regional Education Development and Improvement Program - REDIP), Pembangunan ruang, penunjang dan peralatannya
3. Tatakelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik, meliputi: SIM, MBS, MONEV Independen

Kenyataan menunjukkan, setelah Angka Partisipasi Kasar (APK) mencapai angka 85 %. Untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar mencapai 95 % sangat sulit, faktor penyebabnya antara lain diduga sebagian anak-anak usia 7- 15 tahun terdapat di daerah-

daerah yang terpencil, terpencar, dan terisolasi sehingga mereka tidak terjangkau oleh Sekolah Luar Biasa (SLB).

Pendidikan Inklusif adalah model layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dengan membelajarkan anak berkebutuhan khusus dalam satu komunitas dengan anak-anak pada umumnya di sekolah reguler. Model pelayanan ini tentunya sangat menguntungkan bagi anak berkebutuhan khusus, dimana anak dapat belajar di dekat rumah tempat tinggalnya, anak dapat belajar sosial dalam konteks yang lebih luas, anak dapat belajar dalam lingkungan masyarakat yang sebenarnya, anak dapat pengalaman dari anak-anak pada umumnya. Disamping itu, anak-anak berkebutuhan khusus dapat terlayani akan kebutuhan pendidikannya, juga dapat menyelesaikan program nasional yaitu meningkatkan Angka Partisipasi Kasar 95 % untuk anak usia 7 – 15 tahun.

E. Kesimpulan

Pendidikan inklusif merupakan salah satu strategi kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya dalam meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang berusia 7 – 15 tahun yang sementara ini belum terlayani karena mereka tinggal di daerah terpencil, terpencar, terisolir dan jauh dari lokasi sekolah luar biasa.

Pendidikan inklusif disamping sangat membantu program pemerintah dalam meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan pendidikan, juga secara ekonomi sangat menguntungkan karena penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler, dari aspek pembiayaannya jauh lebih murah ketimbang mendirikan unit sekolah baru SLB karena dapat memanfaatkan guru, staff, sarana dan prasarana yang telah ada di sekolah reguler tersebut

DAFTAR BACAAN

- Abdurrachman, M., Sudjadi, (1994), ***Pendidikan Luar Biasa Umum***, Jakarta: Proyek Pendidikan Tenaga Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Depdiknas, (2006), ***Informasi Program Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama***, Jakarta: Direktorat PSMP Dirjen Mandikdasmen Depdiknas
-(2006), ***Sosialisasi dan Strategi Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun***, Jakarta: Direktorat PSMP Dirjen Mandikdasmen Depdiknas
- Johnsen, B.H, & Skjorten, M.D., (2003), ***Pendidikan Berkebutuhan Khusus***, Sebuah Pengantar Menuju Inklusi, Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia
- Hallahan, D.P., & Kauffman, J.M., (1999), ***Exceptional Childrent Introduction to Special Education***, 4rd edition, New Jersey: Prentice Hall International Inc, Englewood Clifft
- Semiawan, C., (1997), ***Pendidikan untuk Anak berbakat***, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Sunardi, (1999), ***Kecenderungan dalam Pendidikan Luar Biasa***, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bandung